

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH YANG MEMPEROLEH OPINI WTP DENGAN PEMERINTAH
DAERAH YANG MEMPEROLEH OPINI NON WTP**
*(Studi Empiris pada Laporan Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2015-2017)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



Oleh:

RIKI KURNIA
NIM/BP: 1103219/2011

**JURUSAN AKUNTASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH YANG MEMPEROLEH OPINI WTP DENGAN PEMERINTAH
DAERAH YANG MEMPEROLEH OPINI NON WTP

*(Studi Empiris Pada Laporan Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2015-2017)*

Nama : Riki Kurnia
NIM/TM : 1103219/2011
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2019

Disetujui Oleh:

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini WTP Dengan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Non WTP (Studi Empiris Pada Laporan Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Indonesia Tahun 2015-2017)

Nama : Riki Kurnia

Nim/TM : 1103219/2011

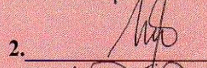
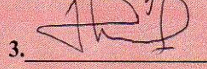
Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2019

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	1. 
2	Anggota	: Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si	2. 
3	Anggota	: Henri Agustin, SE, M.Sc	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riki Kurnia
NIM/Tahun Masuk : 1103219/2011
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta/ 04 Agustus 1992
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jorong Koto Piliang Desa Sumanik, Kecamatan Salimpaung
No. HP/Telp : 082386219536/
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini WTP Dengan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Non WTP

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, April 2019
Yang Menyatakan


RIKI KURNIA
1103219/2011

ABSTRAK

Riki Kurnia
1103219/2011) : **Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan**
Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini WTP
dengan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh
Opini Non WTP(*Studi Empiris pada Laporan*
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017)

Pembimbing : **1. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: bukti empiris mengenai perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan non WTP berbasis Rasio Kinerja Keuangan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2017. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan beberapa rasio yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio belanja operasi, rasio belanja modal dan rasio pertumbuhan PAD yang diperbandingkan antara pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dan non WTP yang diperoleh melalui Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Pengujian hipotesis menggunakan uji beda *independent t- test*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada terdapat perbedaan kinerja keuangan dari berbagai rasio keuangan antara pemerintah daerah kota/ kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non WTP, dengan $t_{hitung} 2,207 > t_{tabel} 2,003$ nilai signifikan $0,103 > 0,05$. Dan terdapat perbedaan kinerja keuangan kriteria efisiensi, efektifitas, belanja operasi, belanja modal dan pertumbuhan PAD antara pemerintah daerah kota/ kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non WTP.

Kata Kunci: Kinerja keuangan pemerintah daerah, Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Opini Audit WTP, Opini Non WTP

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini WTP dengan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Non WTP”. Salawat beriringkan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Disamping itu juga untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan agar menjadikan penulis sebagai orang yang dapat berguna bagi masyarakat.

Penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan serta kemudahan dari berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fefri Indra Arza, SE, Ak M.Sc, selaku Pembimbing I, dan Juga Ibu Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si selaku Penelaah, tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Penelaah II yang telah memberikan waktu dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Idris, M.Si serta para wakil dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua Jurusan dan Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu Staf tata usaha yang memberikan kelancaran serta Bapak dan Ibu staf perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan bahan bacaan.
5. Kedua orang tua tercinta, abang kandung yakni Ridho Akbar, adik tercinta, Riska Apriyeni dan Pera Agustia Putri, yang telah memberikan kesungguhan do'a dan bantuan moril serta materil pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman yang selalu memberikan semangat, motivasi serta bantuan, Muhammad Arief, Muhammad Fadli, Ferry Hardiansyahserta terkhusus dan tersayang yang selalu mensupport selama ini yakni Fani Yusnita.
7. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2011 yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis memohon maaf

jika banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam penulisan skripsi ini. Dan tidak lupa penulis selalu bersyukur dengan apa yang telah diperoleh penulis selama ini dan masih banyak yang ingin penulis ungkapkan, dan semoga semua pihak yang membantu diberikan kemudahan dan dibalas segala yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Penulis sudah berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan metode penelitian. Namun, jika terdapat kesalahan, mohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Amin.

Padang April 2019

Riki Kurnia

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL & HIPOTESIS	6
A. Kajian Teori.....	6
1. Teori Kelembagaan	6
2. Pengukuran Kinerja Keuangan.....	8
3. Manfaat Pengukuran Kinerja	8
4. Indikator dalam pengukuran kinerja	9
5. Opini Audit.....	13
B. Penelitian Terdahulu	14
C. Kerangka Konseptual	16

BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Populasi dan Sampel.....	19
1. Populasi	19

2. Sampel	20
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	20
1. Jenis Data	20
D. Sumber Data.....	21
E. Teknik Pengumpulan Data.....	21
F. Teknik Analisis Data	22
G. Variabel Penelitian	22
1. Variabel Dependen (Y)	22
2. Variabel Independen (X).....	23
H. Penarikan Kesimpulan.....	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Deskriptif Variabel Penelitian.....	25
B. Statistik Deskriptif.....	37
Uji Model Penelitian	38
1. Uji Normalitas	38
2. Uji Deskriptif Statistik	39
3. Uji Heteroskedastisitas.....	40
C. Hasil Analisis Data	41
1. Analisis Independent T-test.....	41
2. Uji Hipotesis.....	42
D. Pembahasan.....	43
1. Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan.....	43
2. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Opini Audit WTP dan Non WTP ..	44
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN	45
A. Kesimpulan	45
B. Keterbatasan Penelitian.....	46
C. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	10
2. Jumlah LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	20
3. Sumber Data Dari Masing-Masing Variabel	21
4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	28
5. Rasio Efektivitas	30
6. Data Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Sampel	30
7. Data Rasio Efisiensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	31
8. Rasio Belanja Operasi	33
9. Rasio Belanja Modal	33
10. Data Rasio Belanja Operasi	34
11. Data Rasio Belanja Modal	36
12. Hasil Statistik Deskriptif	37
13. Uji Model Penelitian	38
14. Uji Normalitas.....	39
15. Uji Deskriptif Statistik.....	39
16. Uji Heteroskedasitas.....	41

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Konseptual	18
2. Grafik I Belanja Operasi.....	33
3. Grafik II Rasio Belanja Modal.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perhitungan Rasio.....	51
2. Perhitungan Opini Audit.....	60
3. Hasil Olah Data SPSS.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah merupakan pelayan masyarakat pada sektor publik dengan wewenang untuk mengatur kepentingan bangsa dan juga kepentingan negara. Pada dasarnya lembaga pemerintahan dibentuk untuk menjalankan aktivitas pelayanan serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjembatani untuk penyediaan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan yang telah ada dalam program pemerintah.

Peningkatan pelayanan lembaga pemerintahan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain pemerintah dapat membantu meringkankan beban masyarakat dalam perihal pengurusan layanan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan secara maksimal. Pelayanan yang diberikan pemerintah daerah nantinya kepada masyarakat menjadi tolak ukur dalam penilaian masyarakat terhadap hasil kerja dari pemerintah daerah.

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 mengenai pemda (pemerintah daerah), dijelaskan jika pelaksanaan pemerintah daerah harus sesuai dengan isi dari UUD Republik Indonesia. Pada Tahun 1945, pemda (pemerintah daerah), yang melakukan kegiatannya secara mandiri, dituntun agar melakukan percepatan pembangunan nasional di suatu daerah dengan menggali berbagai potensi daerah tersebut.

Dengan adanya pengawasan dari pemerintah pusat serta pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang ada. UU No 32 Tahun 2004 mengenai dana perimbangan diisyaratkan jika setiap daerah berhak untuk melakukan kemandirian daerah dan mengatur sendiri daerahnya. Sehingga ada tanggung jawab yang menyeluruh kepada masyarakat.

Dengan mengembangkan potensi daerah serta adanya peningkatan kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat laju pertumbuhan pembangunan di daerah.

PP No 58 tahun 2005 mengenai pelaksanaan keuangan daerah yakni pada ayat 102 alinea pertama menyebutkan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan pemakaian serta pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, dan wajib diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan proses audit laporan keuangan yang telah disusun dan dilaporkan.

Penelitian yang dilakukan Halim (2001:167) mengatakan bahwa ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan sistem pemerintahan serta otonomi daerah yaitu dengan (1) keberhasilan keuangan daerah, dengan kata lain pemerintah daerah mampu untuk menggali potensi daerah yang ada untuk dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah (2) Tidak adanya ketergantungan kepada pemerintah pusat atau meminimalisir bantuan dana dari pemerintah pusat ataupun

bantuan dari pihak asing. Namun pada kenyataan masih banyak daerah yang bergantung kepada pemerintah pusat sejak peraturan mengenai otonomi daerah diberlakukan.

Menurut penelitian Jumingan (2006:239) Pengukuran kinerja keuangan memiliki dua tujuan diantara lain adalah untuk menilai sejauh mana keberhasilan dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan yang kedua yakni untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mempergunakan semua aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara maksimal dan menyeluruh.

Bilamana apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keuangan yang telah dilakukan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan. Tetapi bilamana hasil kinerja melebihi dari apa yang direncanakan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah mempunyai peran yang dominan dalam sistem pemerintahan begitu juga sebaliknya, apabila tidak sesuai dengan yang dianggarkan dan direncanakan diawal maka kinerja keuangan suatu Pemerintah Daerah dapat dikatakan buruk atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Akuntabilitas bukan hanya sekedar untuk melihat bagaimana uang atau dana publik tersebut digunakan secara efisien, efektif dan ekonomi. Efisien dapat juga diartikan bahwa penggunaan dari dana publik menghasilkan pemasukan yang maksimal. Efektif dapat juga diartikan anggaran yang ada sesuai dengan pencapaian target-target yang telah direncanakan serta ekonomi yang dapat diartikan sebagai indikator untuk menilai Pengukuran Kinerja Keuangan melalui berbagai macam indikator (Mardiasmo, 2004:182).

Dari penjelasan latar belakang diatas maka dari itu, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut :

“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Audit WTP dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Opini Audit Non WTP (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Sumbar)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan yang ada pada latar belakang masalah, dapat diketahui penilaian pelaksanaan keuangan pemerintah kabupaten/kota sangat penting dalam menciptakan budaya kerja yang baik serta mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja guna mencapai sasaran yang diharapkan maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP dan Non WTP.

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari penjelasan pada latar belakang dan rumusan masalah maka dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisa perbandingan pelaksanaan (kinerja) keuangan dari pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP (Wajar tanpa pengecualian) dengan pemerintah daerah yang memperoleh opini audit selain WTP (Wajar tanpa pengecualian).

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk banyak pihak, seperti:

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah dari masing-masing kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera Barat.
2. Bagi objek penelitian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dan memberikan pemahaman terhadap pemerintah yang tidak menerima opini WTP.
3. Bagi akademik, sebagai bahan penelitian dibidang akuntansi dan sektor publik serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa.
4. Bagi pihak pemerintah daerah yang ada dapat dijadikan sebagai dasar ataupun landasan dalam mengevaluasi semua kebijakan dan juga kinerja keuangan yang selama ini telah diterapkan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Teori

1. Teori Kelembagaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lembaga berarti bagian dari beberapa perilaku seseorang, tersusun atas hubungan sosial berstruktur yang saling berkaitan satu sama lain. Penelitian Scott (2008), Kelembagaan tersusun atas beberapa kategori yakni kultural, norma, dan juga peraturan yang harus ditaati.

Menurut penelitian Syahyuti (2011), manusia akan berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam kegiatan nya serta melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada termasuk regulasi dan norma, tetapi tidak sepenuhnya menjalankan apa yang sudah ada.

Sebagai makhluk sosial manusia harus memahami lagi beberapa peraturan yang dibuat, kemudian memilih sikap dan perilaku nya sendiri. Salah satu nya dalam hal penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana banyak pemerintah daerah yang masih terlambat dan menunda untuk melakukan penyampaian laporan keuangan pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut. Sehingga menimbulkan masalah dalam akuntabilitas pemerintah.

Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik

PP No 24 tahun 2005 tentang tata cara pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atau dapat juga dikatakan standar penyusunan keuangan daerah mendefinisikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya (bila ada), yang dimaksudkan

untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) serta kebijakan dari pemerintah terhadap kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah .

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Kasmir (2008) mendefinisikan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Sementara itu Halim (2002) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi suatu organisasi pada periode tertentu

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan (Mahsun, dkk 2009) dan informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam memuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa berkualitas (Mahmudi, 2006). Informasi mengenai pengelolaan dana atau pengelolaan dari sumber-sumber data keuangan publik dapat dilihat dari laporan sumber keuangan (Mahsun dkk, 2009). Artinya informasi tentang posisi keuangan dapat ditampilkan secara luas ke publik secara menyeluruh. informasi yang disampaikan berkaitan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Ada beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja sebab pengukuran kinerja dilakukan agar pemerintahan lebih terarah untuk mencapai tujuan yang telah dibuat sebagai sebuah organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga hal yang dimaksud dalam kinerja keuangan. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.

Terbukti dengan dilakukannya pengukuran kinerja program yang dijalankan dalam lebih terukur dan maksimal dalam hasil yang diperoleh sehingga tidak adanya kendala dalam program yang dijalankan. Selain itu, pengukuran kinerja dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi semua kebijakan yang ada serta dapat menjadi patokan serta pedoman untuk melakukan berbagai perbaikan di beberapa sektor yang melayani masyarakat.

3. Manfaat Pengukuran Kinerja

Ada beberapa manfaat pengukuran kinerja pemerintah daerah menurut peneliti diantaranya adalah :

1. Dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan komunikasi antara berbagai sektor maupun pimpinan serta evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan.
2. Dapat dijadikan acuan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah apakah terpenuhi dengan baik dan memuaskan.
3. Membantu pemerintah untuk dapat lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

a. Indikator Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Alat pengukuran kinerja merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi (Monika Kussetya Ciptani, 2000). Beberapa pengukuran kinerja keuangan yang dipakai sebagai alat ukur atau indikator pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah:

1. Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Penelitian Halim (2012) menyebutkan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan keadaan dimana suatu daerah mengalami ketergantungan yang sangat besar terhadap beberapa sumber keuangan eksternal. Semakin tinggi Rasio kemandirian keuangan dari pemerintah maka dengan kata lain dapat dijadikan sebagai acuan dan mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah.

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian, maka hal ini dapat berdampak terhadap rendah nya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dari pendapatan Asli Daerah (PAD), sebab jika semakin tinggi tingkat masyarakat dalam membayarkan pajak dan retribusi daerah maka akan dapat memperbaiki kinerja keuangan dari pemerintah daerah itu sendiri. Serta dapat secara jelas menggambarkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri.

Berikut ini merupakan rumus atau formula yang digunakan untuk perhitungan kemandirian daerah :

$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan pinjaman}}$

Tabel 1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Pendanaan	Persentasi Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Halim, 2001 dalam Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina, 2011

2. Pengukuran Efektivitas Keuangan Daerah

Setiap daerah mengalami kenaikan maupun penurunan PAD yang menjadi dasar untuk melihat berbagai sumber pendapatan dari masing-masing daerah. Tidak tertutup kemungkinan dalam realisasinya, PAD tidak mencapai dari target yang telah ditentukan. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam memaksimalkan pendapatannya. Rasio efektivitas dapat diformulasikan :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah}}$$

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan daerah (Halim, 2007:234). Rasio efisiensi dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

4. Rasio Keserasian Keuangan

Rasio keserasian keuangan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan juga prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2007:236). Ada dua metode lain yang digunakan dalam rasio keserasian ini yakni: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

a. Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total keseluruhan dari belanja daerah. Dengan adanya rasion ini dapat menginformasikan secara keseluruhan mengenai porsi dari belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Pada dasarnya dari belanja operasi mendominasi dari total keseluruhan belanja daerah dengan persentase berkisar antara 60% sampai dengan 90% tergantung dari kebijakan pemerintah daerah.

Rasio belanja operasi dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

b. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi dari belanja modal tahun berjalan dengan realisasi total belanja daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan rasio ini, para pembaca dan pengguna laporan keuangan dapat mengetahui secara pasti porsi dari masing-masing belanja daerah yang dialokasikan apakah untuk digunakan dalam pembelian aset daerah atau digunakan untuk kepentingan investasi yang dilakukan pemerintah daerah baik dalam jangka panjang atau dalam jangka pendek. Serta dapat menyesuaikan dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan dengan berbagai pertimbangan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah antara 5-20% (Mahmudi, 2010:164). Rasio belanja modal dapat dirumuskan :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

5. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Mahmudi, 2010:138) yang dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}_{Xn} - X_{n-1}}{\text{Total Belanja Daerah}_{Xn-1}}$$

Dimana : X_n = Tahun Sekarang

X_{n-1} = Tahun Sebelumnya

4. Opini Audit

Tahap akhir dari proses audit adalah dikeluarkannya opini. Opini auditor adalah hasil dari pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dan telah lulus dari salah saji yang material.

Pengertian itu terdapat dalam pasal 1 ayat 11 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan. Kinerja auditor dari kalangan professional serta kinerja seorang auditor dalam menyatakan pendapatnya harus berlandaskan dari bukti-bukti audit yang telah di isi pada lembar kerja pemeriksaan. Seorang auditor dalam menyatakan opini serta pendapatnya harus berlandaskan pada kenyataan dilapangan yang terjadi dari proses audit yang dilaksanakan. Apakah telah sesuai dengan prosedur atau tidak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa dalam pemeriksaan keuangan yakni:

1. WTP (wajar tanpa pengecualian) Murni dimana laporan keuangan pemerintah daerah yang dibuat telah sesuai dengan standar pelaporan akuntansi pemerintahan.
2. WTP (wajar tanpa pengecualian) dengan paragraf penjelas dimana laporan keuangan yang ada masih ada beberapa item yang sesuai namun dikecualikan dalam pelaporan.
3. WDP (wajar dengan pengecualian) dimana pemerintah daerah masih ada beberapa item yang tidak sesuai dengan standar yang telah dibuat atau ketidak konsistenan penggunaan metode dalam penyusunan laporan keuangan seperti metode penyusutan yang berubah-ubah setiap tahunnya.

4. TW (tidak wajar) dimana ada kesalahan yang materialistis atau fatal dalam penyusunan laporan keuangan.
5. Disclaimer (ditolak/tidak memberikan pendapat) dimana laporan keuangan yang disajikan tidak memenuhi ketentuan dari standar yang telah dibuat.

Selain dari keempat jenis opini tersebut, BPK juga memberikan opini lain yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas.

Menurut McLelland dan Giroux (2000) dalam Aris (2014), opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) (*unqualified opinion*) adalah pencapaian terbesar bagi sebuah pemerintah daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis menjadikan bahan acuan penelitian berikut sebagai acuan dalam memperkaya teori dalam melakukan penelitian ini. Peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian yang dibuat oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengambil beberapa penelitian yang serupa dengan yang akan dibuat oleh penulis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis:

- a. Marfiana dan Lulus Kurniasih (2013) dalam penelitian berjudul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini penulis akan menguji apakah karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio efisiensi.

Hasil penelitian ini yaitu ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah di Pulau Jawa. Sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa.

- b. Kurrohman (2013) dalam penelitian berjudul Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur. Dalam penelitian ini penulis ingin menguji kinerja keuangan pemerintah daerah setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja dengan pendekatan value for money.

Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisien dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja.

- c. Dwijayanti dan Rusherlistyanti (2013), dalam penelitian berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi SeIndonesia. Penelitian ini bertujuan membandingkan kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia dan menentukan ada atau tidaknya perbedaan dari beberapa rasio keuangan yang digunakan, seperti kinerja keuangan berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio aktivitas, serta rasio pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio belanja rutin, dan rasio belanja pembangunan, sedangkan untuk rasio efisiensi, rasio pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja

rutin, dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintahan se-indonesia mulai dari tahun 2008-2010

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Laporan keuangan pemerintah merupakan bagian yang terpenting untuk keberlangsungan organisasi sektor publik dan juga sebagai bentuk dari penilaian masyarakat terhadap semua pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat.

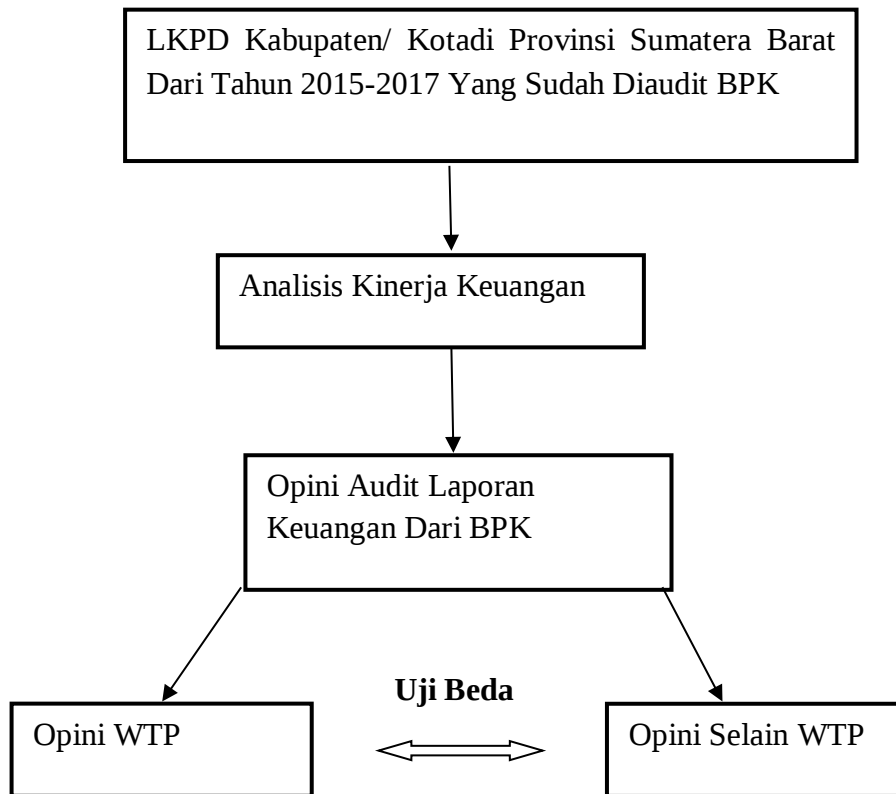
Semakin baik kinerja keuangan suatu pemerintah daerah mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan daerahnya semakin baik dan demikian pula sebaiknya (Halim, 2002). Dengan kata lain output dalam hasil audit merupakan gambaran secara keseluruhan terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan kementerian/lembaga, maka laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan pemeriksaan (Kawedar, 2008).

Output yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan cermin bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD. Dengan didatarkannya opini wajar tanpa pengecualian terhadap suatu kabupaten/kota, diharapkan kinerja pemerintah daerah, dilihat dari pertumbuhan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pelayanan dasar kepada masyarakat di kabupaten/kota tersebut juga telah lebih baik daripada kabupaten/kota yang belum menerima opini wajar tanpa pengecualian.

Khairudin (2013) menemukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP lebih baik dan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang beropini

Non WTP. Jika pengelolaan keuangan suatu daerah sudah baik, maka diharapkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut juga baik, hal ini mengindikasikan keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. Maka berdasarkan uraian diatas, hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H1: Kinerja keuangan pemerintah daerah dengan opini WTP lebih baik dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang mempunyai opini selain WTP

RERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Non WTP di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada terdapat perbedaan kinerja keuangan kriteria ekonomis antara pemerintah daerah kota/kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non WTP. Hal ini menunjukkan opini yang didapatkan pemerintah daerah kabupaten/kota menunjukkan perbedaan yang signifikan kinerja yang berkaitan dengan tingkat ekonomis kinerja keuangan.
2. Ada terdapat perbedaan kinerja keuangan kriteria efisiensi antara pemerintah daerah kota/kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non WTP. Hal ini menunjukkan bahwa Opini WTP yang diterima oleh Pemerintah daerah dapat menjamin kinerja keuangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi baik.
3. Tidak terdapat perbedaan perhitungan rasio keuangan pemerintah daerah baik yang memperoleh Opini WTP dengan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Selain WTP.
4. Terdapat hubungan yang signifikan dari Rasio Pertumbuhan PAD terhadap opini audit pemerintah daerah, dimana Rasio Pertumbuhan PAD menjadi bagian terpenting dalam memperoleh Opini Audit.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan terkait penelitian ini yaitu:

1. Sampel yang digunakan adalah pemerintah daerah di provinsi Sumatera Barat tahun 2015-20157, tidak melibatkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia, sehingga hasil penelitian ini belum dapat menggambarkan kondisi pemerintah daerah secara menyeluruh di Indonesia.
2. Perbandingan kinerja yang digunakan pada penelitian ini terbatas hanya uji beda antara kinerja keuangan pemerintah daerah yang beropini WTP dan non WTP, sehingga kurang memberikan keadaan kinerja pemerintah daerah yang memperoleh opini WDP, TW, dan TMP. Agar penelitian selanjutnya mempertimbangkan kinerja keuangan dengan opini tersebut.
3. Penggunaan indikator kinerja hanya terbatas pada penggunaan Enam jenis rasio keuangan, yaitu kemandirian daerah, Rasio efisiensi, dan efektivitas, Rasio Belanja Operasi, Rasio Belanja Modal dan Rasio Pertumbuhan PAD.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran yang bisa penulis sampaikan yaitu:

1. Bagi Pemerintah daerah kabupaten/ kota agar lebih baik dalam melakukan penganggaran untuk meningkatkan kinerja keuangan dan diharapkan dengan opini yang baik akan mencerminkan kinerja keuangan yang baik juga, selain itu pemerintah daerah dengan Opini Non WTP tidak selamanya buruk dalam pengelolaan keuangan.

2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah dan memperluas indikator kinerja yang digunakan agar penelitian dapat lebih baik. Serta menambah sampel yang lebih banyak lagi, agar hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini dari BPK secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Andvig, Jens Chr., Odd-Helge Fjeldstad, Inge Amundsen, Tone Sissener & Tina Søreide. 2001. *Corruption A Review of Contemporary Research*. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights Report R 2001:7
- Angelina, Novita dan Irsitami. 2012. *Hubungan Antara Opini Audit Atas Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Dengan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota*. Jurnal. Politeknik Negeri Batam
- Budiarta, ketut (2010) .*Menelusuri Opini Auditor Independen atas LKPD Pemerintah Provinsi Bali*. Fakultas Ekonomi. Universitas Udayana
- BP, Roy (2016). Pemkot Bandarlampung Enam Kali Raih Opini WTP. Tersedia :<http://www.antaralampung.com/berita/290490/pemkot-bandarlampung-enam-kali-raih-opini-wtp>. (28 November 2018)
- Dwijayanti, Retno dan Rusherlisyanti. 2013. *Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah propinsi seindonesia*. Jurnal ekonomi dan bisnis volume 12 nomor 01. Universitas Pekalongan
- Halim,A.2004.*Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- _____.2007.*Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga.Jakarta: Salemba Empat.
- Heriningsih, Sucahyo. 2014. *Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Kabupaten Dan Kota di Indonesia*. Jurnal Vol. 2, No. 2, Desember 2008
- Indrarti, Nuansa Mega Okky. 2011. *Hubungan antara Opini Audit pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. Jurnal. Universitas Riau.
- Jensen M. C, &W. Meckling. 1976. *Theory of Firm :Managerial Behavior, Agency cost. And Ownership structure*.Journal of Financial Economics.11(4) :5-50
- John.Elliott.2002. *The Impact Of Intensive 'Value For Money' Performance Auditing In Educational Systems*.Journal of Educational Action Research, 10:3, 499-506.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Krisna. 2008. *Pengaruh Lingkungan Kerja, Stres, dan Konflik Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT. Bank Sri Partha Kantor Pusat Denpasar*.Tesis. Universitas Udayana Denpasar.
- Kurrohman, Taufik. 2013. *Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur*. Jurnal Dinamika Akuntansi Volume 5 No 1 (2013) Universitas Jember

- Lane, Jan-Erik. 2000. *The Public Sector-Concepts, Models, and Approaches*. London :SAGE Publications
- Liando, H.S., D.P.E. Saerang, I. Elim (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangehe Menggunakan Metode Value For Money*. Jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014, Hal. 1686-1694
- Mahmud, M.Hanadie. 2009. *Analisis Laporan Keuangan* : Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2006. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* .Yogyakarta :UPP STIM YPK
- Mahsun, Budi Harjo Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisiketiga.Yogyakarta: BPFE
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia* Jakarta: Refika Aditama
- Mardiasmo. 2009.*Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniasih. 2013. *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemerisaann Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota*. Jurnal Universitas Sebelas Maret. Hal 1-16
- Mirza, Rifka Amalia (2012). *Analisis kinerja keuangan pemerintah Pusat tahun 2005 sampai tahun 2010*.Tesis. Universitas Diponogoro Semarang
- Moe, Terry M. (1984). *"The New Economics of Organization"*. American Journal of Political Science
- Nugrahani, T.S. (2007). *Analisis Penerapan Konsep Value for Money pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Akmenika.Volume 1, 2007.Hlm.1-17.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- _____, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- _____, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
- _____, Undang- undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten atau Kota.
- _____, Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

- _____. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- _____. Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 Tentang Standatr Akuntansi Pemerintah.
- _____. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- _____. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.320.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- Sedarmayanti. 2011. *Dasar-dasar Pengetahuan tentang Manajemen Perkantoran*. Bandung : MandarMaju
- Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. (1998). "Principals and Agents: An Explanatory Model for Public Budgeting". *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*
- Sudarsana, Susila Hafidh. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Diponegoro Journal of Accounting. 2 (4), pp: 1-13.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA
- Sukarta A.W (2015). *Lima daerah di Lampung dapat WTP berturut-turut* [Online]. Tersedia: <http://www.antaralampung.com/berita/282962/lima-daerah-di-lampung-dapat-wtp-berturut-turut>. 02 November 2017]
- Wakhyudi. 2011. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Ciawi : Pusdiklatwas BPKP
- Yasmin, Anifa. (2016). *Perbandingan kinerja Pemerintah Kabupaten/ Kota yang memperoleh Opini WTP dan Non WTP*. Tesis. Universitas Lampung